



CITRA PEREMPUAN DALAM POLITIK

Tri Marhaeni Pudji Astuti^{)}*

^{*)} Penulis adalah Doktor (Dr.), dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Abstract: *Woman image in politic cant separated from woman social construct in social relation. This image in people's mind is stereotype and gender concept about woman in all sector, include in political and government sector, that woman "incapable" to lead, because woman is irrational and rely on her emotion. Actually, there's woman's chance to enter political domain, but it's very rare. Woman justified as improper to politic because woman is kitchen/domestic "inhabitant", irrational and nervous to take a risk. There's several factor that influence emergence woman's leader, namely patriarchy culture, family relation, martyrdom, social class, lifestyle, social context, prison experience, and election system. Therefore, it's necessitating more woman candidate in political domain, objective recruitment process, and initialized with quota's system to create critical numbers of woman politicians.* **Keywords:** Woman image, politic, stereotype, quota's system.

A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang perempuan dan politik, tidak lepas dari *image* dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. *Image* yang selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat adalah konsep-konsep stereotype tentang perempuan di berbagai sektor, termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. *Image* yang kebanyakan merupakan stereotype tentang perempuan, akhirnya "ditarik" ke dunia publik —termasuk di dunia politik— bahwa perempuan "tidak layak" memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang bersumber dari stereotype dan keyakinan gender inilah yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender di berbagai sektor.

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan stereotype bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah "penghuni" dapur/domestik, tidak bisa berpikir rasional dan, kurang berani mengambil risiko, yang kesemuanya itu sudah menjadi stereotype perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender.

Faktor lain adalah ketimpangan-ketimpangan gender yang berakar dari sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dan tidak bisa berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat dunia politik adalah "milik laki-laki", maka masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik pada kaum perempuan.

Tulisan ini sengaja mengkaji wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara karena wilayah ini dikenal memiliki pemimpin perempuan atau tokoh perempuan yang terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Misalnya, Indira Gandhi, Benazir Bhuto, Khaleda Zia, Sirimavo Bandaranaike, Corazon Aquino, Aung



San Suu Kyi, dan Megawati Sukarno Putri. Kendati di antaranya ada yang sudah meninggal dan tidak lagi berkuasa, bukan berarti perjalanan mereka dalam memimpin negara atau partai sudah tidak menarik lagi untuk dikaji. Selain itu, juga sebagai gambaran bahwa tokoh-tokoh politik di Asia Selatan dan Tenggara tersebut, setidaknya sama kondisinya dengan yang dialami di Indonesia. Setidaknya kita menjadi tersadar bahwa kemunculan tokoh perempuan dalam perpolitikan memiliki karakteristik yang hampir sama

B. CITRA PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ASIA¹

Faktor dasar yang dianggap mempengaruhi kemunculan pemimpin perempuan di dunia politik adalah budaya patriarkhi, pertalian keluarga, *martyrdom*, kelas sosial, gaya hidup, konteks sejarah, pengalaman penjara, dan sistem pemilihan umum. Faktor ini saling terkait satu sama lain.

Budaya Patriarkhi yang sangat dominan di Asia Selatan dan Tenggara, sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun ke dalam dunia politik, atau lebih jauh lagi memegang tampuk pimpinan politik nasional. Berdasarkan budaya patriarkhi, dominasi kaum laki-laki dilegitimasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Konsekuensinya, perempuan hanya dibenarkan atau diterima perannya dalam lingkup publik atau politik, sekadar untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh kematian atau pemenjaraan salah seorang anggota keluarga laki-laki. Jadi, kepemimpinan politik perempuan dapat diterima bukan karena masyarakat menganggap kaum perempuan mampu dan berhak terjun ke dunia politik, melainkan karena tindakan ini dapat menjunjung tinggi nama keluarga.

Budaya patriarkhi sangat erat kaitannya dengan faktor pertalian keluarga dan *martyrdom*. Peluang seorang perempuan untuk memegang tampuk pimpinan politik akan lebih besar apabila memiliki hubungan keluarga dengan seorang pemimpin politik laki-laki terkemuka. Peluang ini menjadi lebih besar dengan kematian pemimpin atau tokoh politik laki-laki tersebut yang kemudian dianggap wafat sebagai martir. *Martyrdom* biasanya dikaitkan dengan kematian seorang tokoh politik karena pembunuhan (*assassination*). Hal ini dialami oleh hampir semua perempuan pemimpin politik di Asia Selatan dan Tenggara.

Benazir Bhutto mengambil alih kepemimpinan *Pakistan People Party* sejak ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto, dipenjarakan dan akhirnya dihukum gantung oleh presiden Zia Ul Haq. Kematian seorang anggota keluarga laki-laki yang merupakan tokoh pemimpin politik sebagai martir juga menunjang naiknya Cory Aquino, Sirimavo Bandaranaike, Khaleda Zia, dan Aung San Suu Kyi.

Sosialisasi politik dalam keluarga juga mempengaruhi kepekaan politik para pemimpin perempuan yang secara tidak langsung mempersiapkannya untuk terjun ke dunia politik. Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Cory Aquino, Aung San Suu Kyi, dan Megawati Sukarnoputri dibesarkan dalam keluarga yang aktif terlibat politik di negara masing-masing. Jika dicermati, para pemimpin perempuan tersebut berasal dari kaum elite di negara masing-masing. Paling tidak dari kalangan menengah-atas. Hal ini mempengaruhi tingkat pendidikan dan sosialisasi politik mereka. Hal lain yang menunjang peran para perempuan tersebut ialah gaya hidup kelas menengah-atas yang memungkinkan mereka memiliki sistem pendukung seperti pembantu rumah tangga, juru masak, sopir, asisten pribadi, sekretaris, dan lain-lain sehingga perempuan tersebut dapat melaksanakan segala kegiatan tanpa harus dibebani berbagai tugas kerumahtanggaan. Kesempatan itu akan lebih banyak lagi dimiliki oleh kalangan menengah-atas karena



kemungkinan mereka untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dan lebih terbuka, jika dibandingkan dengan para perempuan kalangan bawah.

Kecenderungan yang terjadi dalam budaya patriarkhi adalah tokoh politik (atau perempuan yang berkiprah di dunia publik) juga harus dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Tidak peduli siapa yang salah atau penyebabnya apa, ketika ada seorang tokoh perempuan di dunia publik. Akan tetapi, kehidupan rumah tangganya kurang atau tidak harmonis, maka kesalahan langsung ditimpakan kepada perempuan. Hal ini menyurutkan langkah perempuan yang tergerak mengekspresikan eksistensinya, sekaligus merupakan gambaran dominasi budaya patriarkhi yang menempatkan peran kaum perempuan dalam lingkup privat atau rumah tangga. Peran politik diperbolehkan sejauh fungsi rumah tangga tetap dapat berjalan seperti biasa. Hal ini pula yang mendorong Benazir Bhuto menerima perjodohan dan perkawinan, yang telah diatur oleh keluarganya.

Agaknya ada satu lagi faktor yang terjadi di Indonesia, yakni faktor romantisme dan nostalgia nama besar ayah atau anggota keluarga laki-laki, yang telah menjadi pemimpin atau tokoh politik. Hal ini tidak bisa kita pungkiri. Naiknya Megawati Sukarnoputri, didukung sebagian kalangan generasi tua yang merindukan romantisme gaya kepemimpinan Bung Karno, mereka sekadar ingin bernostalgia, dan berharap dapat “melihat gaya kepemimpinan Bung Karno hidup kembali”.

Munculnya pemimpin politik di dua kawasan ini juga dilatarbelakangi gerakan atau momentum politik penting di negara mereka masing-masing. Salah satu momentum penting adalah gerakan kemerdekaan atau gerakan nasionalis yang melanda kawasan ini pada tahun 60-an. Gerakan kemerdekaan dan momentum politik penting dianggap memolitisi seluruh bangsa bersangkutan, baik laki-laki maupun perempuan. Gerakan kemerdekaan dan juga gerakan lain atau momentum politik penting lain, juga banyak mengakibatkan tokoh pejuang yang diasingkan, dipenjarakan, atau dibunuh, sehingga membuka peluang bagi istri atau anak-anak perempuannya untuk terjun ke dunia politik.

Pengalaman penjara tidak saja melatih seseorang untuk menjadi pemimpin politik, tetapi juga memperkuat status politiknya sebagai pahlawan. Hal ini dialami oleh Benazir Bhuto dan Aung San Suu Kyi. Cory Aquino, menjadi perantara politik antara suaminya—yang dipenjarakan—dengan pendukungnya, sehingga secara tidak langsung Cory yang ibu rumah tangga terlatih untuk berpolitik.

C. GAMBARAN DI INDONESIA

Di Indonesia, gambaran peran perempuan dunia publik yang terkait dengan politik secara statistik masih belum menggembirakan. Hal itu dapat dicermati dari hasil pemilu dari tahun ke tahun.² Peran perempuan di bidang politik, termasuk pucuk pimpinan penentu kebijakan di pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, desa sekalipun, masih didominasi kaum pria. Bukan berarti tokoh politik perempuan, dan pemimpin perempuan di bidang pemerintahan tidak ada, namun jumlahnya masih sangat jauh dari imbang dengan jumlah pemimpin dan tokoh politik laki-laki. Sementara itu, secara statistik jumlah penduduk lebih banyak perempuan daripada laki-laki.

Minimya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik, menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang mempengaruhi kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki, yang sebagian besar masih meng-*image*-kan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, perempuan *manut* saja apa keputusan politik yang akan diambil oleh laki-laki karena laki-laki yang tahu dan layak berpolitik, serta segudang *image* patriarkhi lainnya.



Bahkan dalam tulisan Vicky Randall (1982) mengindikasikan bahwa jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah. Dampak yang paling jelas adalah akan terjadinya perluasan *scope* politik ke arah masalah-masalah dan isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan, dan lainnya. Kehidupan politik barangkali akan lebih bermoral karena perempuan lebih mementingkan isu-isu *Conventional Politics* seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, kesejahteraan sosial daripada *Hard Politics* seperti anggaran pembelian senjata, perang, nuklir, dan sebagainya. Tulisan Randall inilah yang harus kita buktikan kebenarannya, apakah di Indonesia juga demikian? andai banyak perempuan yang masuk dalam proses pengambilan keputusan politik.

Berbagai faktor menyebabkan banyak perempuan di Indonesia enggan masuk wilayah politik. Di awal tulisan ini, sudah disebutkan faktor-faktor tersebut. Pendidikan, pengetahuan, dan sosialisasi dalam keluarga memegang peran penting bagi para perempuan dan juga laki-laki dalam mengambil peran dan posisi di dalam masyarakat. Oleh karenanya, memahami perempuan (dan juga laki-laki) harusnya juga dilihat pada konteks mereka berada, dan seperti apa dalam masyarakat?

Walaupun secara formal semua aturan perundang-undangan yang ada menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih luas terjadi di berbagai bidang. Di bidang politik, tema mengenai partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan perempuan menjadi tema sentral yang harus segera diselesaikan.

Di Indonesia, prinsip persamaan antara laki-laki telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita yang telah diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984. Dalam konvensi ini partisipasi politik perempuan diatur dalam pasal 7, yang antara lain memuat ketentuan sebagai berikut.

- Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih.
- Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan, dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
- Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan.
- Perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Semua peraturan perundangan sudah memuat aturan yang nondiskriminatif terhadap perempuan, tetapi situasi yang ada masih memperlihatkan partisipasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan tetap marginal, dan kurang mewakili bidang tertentu, di mana keputusan dan kebijakan yang penting dibuat.³

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal baru karena perempuan telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan. Sebelum datangnya kolonialisme juga telah dikenal beberapa nama dalam sejarah politik bangsa, seperti Sultan Sri Ratu Alam Safiatuddin Johan Berdaulat, yang dinobatkan memerintah pada tahun 1641 – 1675 di Aceh; Siti Aisyiah W. Tenriolle dari Ternate; Sanggramawijaya yang menjadi tangan kanan Airlangga, dan tokoh-tokoh lain.

Kolonialisme telah melahirkan organisasi-organisasi kebangsaan seperti Budi Utomo dan Partai Nasional Indonesia. Rangkaian sejarah tersebut membawa pengaruh baik langsung maupun tidak langsung bagi keterlibatan perempuan Indonesia dalam perjuangan bangsa. Kemudian diikuti oleh lahirnya berbagai organisasi wanita. Bahkan sebelum sumpah pemuda pun telah banyak muncul



organisasi perempuan yang politis, seperti Wanito Utomo, Wanito Mulyo, Wanita Katholik, Putri Budi Sejati, dan banyak lagi yang lainnya.⁴

Kesadaran politik bagi perempuan juga telah melahirkan Kongres perempuan Indonesia yang pertama, di Yogyakarta pada 22 Desember 1928. Kongres perempuan yang selalu dilaksanakan setiap 22 Desember sampai dengan tahun 1943, sebenarnya adalah kongres yang menghasilkan keputusan-keputusan politik penting bagi bangsa Indonesia. Jauh dari hiruk-pikuk dan segala macam stereotipe khas perempuan. Namun, sekarang ini, ketika setiap 22 Desember diperingati sebagai hari Ibu, yang muncul justru penegasan *image* stereotipe perempuan. Setiap tanggal 22 selalu diadakan berbagai lomba memasak, memasang *sanggul*, memasak oleh para bapak, merangkai bunga, menggulung *stagen*, merias tanpa kaca, dan segudang kegiatan lain yang jauh dari bidang proses pengambilan keputusan politik negara. Sangat ironis memang, seolah perempuan ditarik kembali mundur ke belakang dan dimasukkan kembali ke dalam dunia domestik. Hal ini terjadi karena kenyataan sejarah pergerakan perempuan tersebut jarang disentuh, dan jarang dijadikan semangat untuk menguatkan argumentasi bahwa pada waktu itu saja perempuan dapat kerkiprah dalam dunia politik, mengapa sekarang justru tidak?

Bukan berarti saat ini tidak ada perempuan yang menjadi tokoh politik, tetapi jumlah dan kualitas belum seperti yang diharapkan. Dari jumlah yang sedikit itu, juga belum semuanya mempunyai sensitivitas gender. Kalaupun mereka telah mempunyai sensitivitas gender, dan perspektif gender dalam setiap ide dan kebijakan politiknya, namun mereka kembali menghadapi halangan untuk mewujudkannya.

D. HAMBATAN BAGI PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK

Secara statistik, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Seharusnya perempuan mempunyai kemampuan dan peran yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, yang terjadi, justru perempuan sering tidak terpilih atau dipilih dalam pencalonan diri. Mengapa hal ini terjadi? Apakah perempuan kurang cukup dapat mengkampanyekan dirinya/citra dirinya? Apakah perempuan-perempuan pemilih tersebut memang sudah puas dan menganggap kepentingannya sudah dapat diwakili oleh laki-laki? Apakah memang perempuan tidak diberi kesempatan untuk direkrut dan dipilih sebagai pemimpin? Sudah tentu semua alasan itu saling berkaitan dan menyebabkan ketimpangan jumlah perempuan pada tataran pengambil keputusan.

Di Indonesia, hambatan partisipasi bagi perempuan untuk berpolitik juga tidak jauh berbeda dari yang terjadi di Asia Selatan dan Asia Tenggara, antara lain faktor ekonomi, sistem kepartaian, mitos yang berkaitan dengan sosial budaya, stereotip, segregasi gender dalam bidang pekerjaan, dan budaya patriarkhi.

Selain semua faktor tersebut, institusi politik yang ada seringkali menyebabkan perempuan menjadi tidak tertarik untuk memasukinya. Institusi politik sampai sekarang masih didominasi sebagian besar oleh laki-laki, dan perempuan juga tampaknya tidak didorong untuk memasukinya. Dominasi laki-laki ini menjadikan institusi politik berwajah maskulin. Struktur politik yang ada sekarang di Indonesia, masih didominasi oleh laki-laki dan sulit bagi perempuan untuk menembus barikade yang sudah sangat kuat tersebut.⁵

Dalam situasi seperti itu, perempuan yang terjun di bidang politik harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dari rekan-rekannya, yakni politisi laki-laki. Selain harus berkompetisi dengan kaum laki-laki di dunia yang menjadi domain laki-laki, perempuan juga masih diharapkan untuk memerankan



peran-peran yang secara gender telah ditetapkan sebagai peran perempuan. Lebih berat lagi, perempuan yang memasuki dunia politik atau dunia publik sering mendapat pandangan negatif dari masyarakat karena perempuan dianggap mengadopsi sifat-sifat dan peran-peran laki-laki. Misalnya saja perempuan yang memasuki bidang politik mendapat label ambisius dan agresif, sementara laki-laki yang memiliki karakteristik yang sama jarang diberi label demikian. Yang lebih parah lagi, dalam berkompetisi laki-laki lebih senang berkompetisi dengan sesama laki-laki daripada dengan perempuan, karena *image* bahwa jika menang bersaing dengan laki-laki masih ada kebanggannya dan wajar, tetapi jika menang bersaing dengan perempuan tidak membanggakan sama sekali karena dianggap sudah seharusnya menang, dan jika kalah malah aneh. Demikian pula jika dikalahkan sesama laki-laki, mereka menganggap permainan *fair*, tetapi jika dikalahkan oleh perempuan mereka menganggap dipermalukan dan menuduh ada permainan yang *tidak fair*. Ujung-ujungnya menuduh berbagai hal negatif terhadap perempuan. Implikasinya, laki-laki akan menjadi “lebih jahat” ketika tahu lawan politiknya adalah perempuan.⁶

Berbagai tantangan yang dihadapi kaum perempuan ketika memasuki dunia politik untuk menjadi pucuk pimpinan sangat beragam. Hal ini tampaknya berlaku di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Akibat ketiadaan basis institusional dan pendukung, perempuan pemimpin politik umumnya sering mendapatkan tantangan dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Misalnya, kelompok militer, kasus di Myanmar dapat menunjukkan hal ini. Kredibilitas pemimpin perempuan baru dapat diterima di kalangan militer, apabila ia berhasil menangani situasi yang menuntut keterlibatan aspek militer. Indira Gandhi mendapat dukungan militer ketika perannya yang kuat dalam perang India Pakistan tahun 1971. Selain itu, tindakannya yang keras dan cukup represif terhadap kaum fundamentalis Hindu, Sikh, dan Islam di India juga dikagumi kelompok militer.⁷

Selain kelompok militer, masih ada tantangan kelompok lain, yakni kelompok agama. Di Asia Selatan dan Tenggara juga mengalami hal ini. Indira Gandhi harus membayar mahal dengan nyawanya, ketika dia menekan kelompok fundamentalis di India. Benazir Bhutto juga mengalami tantangan kelompok fundamentalis Islam di Pakistan karena ia ingin memperjuangkan hak-hak perempuan Pakistan. Ternyata jika dicermati, tidak hanya sosok jenis kelaminnya perempuan yang ditentang, tetapi juga kebijakan yang memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi perempuan mendapatkan tantangan.

Bagaimana di Indonesia? Meski tidak separah di Myanmar, namun basis dukungan pemimpin politik di militer juga masih minim, akibatnya banyak keputusan yang dibuatnya mendapat hambatan dari militer, baik langsung maupun tidak langsung. Kelompok agama juga sempat menghambat naiknya Megawati menjadi presiden dengan mengusung justifikasi agama bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Namun, karena berbagai hal politis terjadi dan mendukung naiknya Megawati ke tampuk kepemimpinan nasional, kelompok agama yang sebelumnya menentang ramai-ramai mengatakan bahwa tantangan tersebut hanya mengada-ada dan hanya dibuat-buat.⁸

Dari kesemuanya itu, yang perlu dicatat adalah setelah masuk dalam dunia politik, dan memegang tampuk pimpinan, perempuan umumnya menghadapi tantangan-tantangan yang bersifat *gender specific*.

D. TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN

Di kalangan ahli politik dan pemerhati masalah perempuan, muncul perdebatan tentang bagaimana strategi yang harus ditempuh untuk mengatasi situasi tersebut di atas? Apakah partisipasi yang adil di bidang politik menambah jumlah perempuan untuk turut dalam proses pengambilan keputusan menjadi prasyarat bagi kemajuan perempuan? Atau terlebih dahulu harus diciptakan pemajuan perempuan “*the*



advancement of women” yang bisa dilakukan melalui peningkatan pendidikan, pekerjaan, dan perbaikan sistem hukum, sebagai prakondisi untuk menciptakan partisipasi yang adil di bidang politik dan pengambilan keputusan? Pertanyaan selanjutnya, jika *advancement of women* memang merupakan prasyarat, sejauh mana *advancement of women* diperlukan sampai bisa dimungkinkan terjadinya partisipasi penuh di bidang politik dan pengambilan keputusan?

Secara hukum dan peraturan memang tidak ada aturan yang mendiskriminasi perempuan atau laki-laki dalam hal partisipasi politik maupun partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hak-hak politik telah diatur pula dalam UUD 1945 pasal 27, bahkan pemerintah juga telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Semua itu memperlihatkan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kemajuan bagi perempuan. Namun, semua kata-kata itu hanya indah tertuang dalam teks, belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi perempuan selain harus aktif berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan untuk dapat mengubah kondisi, yang saat ini banyak mereka hadapi berupa keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan. Perlu untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, yang ditujukan agar perempuan tidak hanya dilihat sebagai objek, yang keberadaannya dan kepentingannya ditentukan oleh pihak-pihak di luar dirinya.

Untuk tujuan itu, lebih banyak calon dan kandidat perempuan harus dipilih dan proses rekrutmen yang objektif harus dilaksanakan, guna mencegah diskriminasi terhadap perempuan. Pada situasi seperti sekarang ini, di mana partisipasi perempuan dalam politik sangat minim, ada baiknya diterapkan sistem kuota. Sistem kuota dapat dijadikan langkah awal untuk menciptakan *critical numbers* politisi perempuan. Dengan sistem ini, perempuan dapat dipilih berdasarkan sistem proporsional jumlah mereka. Hal ini sangat diperlukan, mengingat hanya dengan cara tersebut perempuan secara potensial dapat mengisi kedudukan-kedudukan dalam institusi pengambilan keputusan. Logikanya hanya dengan jumlah perwakilan yang cukup besarlah kepentingan mereka dapat diperjuangkan.

Sayangnya, “cinta politik tidak sama dengan logika”. Kenyataan yang terjadi ketika sistem kuota yang diterapkan semua partai tidak bisa memenuhi ketentuan kuota 30%, dengan berbagai alasan. Misalnya, tidak ada calon perempuan yang berkualitas, akhirnya seadanya, maka penempatan tetap pada *nomor urut sepatu* sehingga tidak terpilih. Calon yang berkualitas biasanya sudah mapan pada institusi atau lembaga pemerintah, yang harus memilih antara politik atau PNS sehingga banyak perempuan yang tidak mau ambil risiko terhadap masa depannya. Banyak kasus terjadi, sudah terlanjur keluar dari PNS *toh* nyatanya juga *ditaruh* di *nomor urut sepatu*, akhirnya tidak terpilih dan nasibnya terkatung-katung. Padahal, ketika kampanye perempuan dijadikan *vote gathther* dan sangat menguntungkan dalam hal perolehan suara, namun kenyataan politik tidak selalu sesuai dengan logika.

Bagi partai politik, usaha yang lebih aktif perlu digalakkan untuk merekrut lebih banyak perempuan dalam kepemimpinan partai, baik di tingkat DPC, DPW, maupun DPD dan DPP. Salah satu partai sudah mulai melakukan hal ini, yakni PDI perjuangan sejak tahun 1987 mengharuskan memilih kandidat perempuan sebagai caleg nomor tiga di tingkat DPD dan caleg no lima di tingkat DPC. Akan tetapi, sekali lagi kenyataan tidak seindah yang dibayangkan.

Perempuan juga harus diyakinkan bahwa mereka harus bersedia memajukan dirinya sebagai kandidat karena tanpa partisipasi penuh dari perempuan cita-cita untuk kemajuan perempuan tidak akan tercapai. Persoalannya, ternyata tidak hanya pada “mau” dan “tidak mau”. Kandidat perempuan yang maju mencalonkan diri atau dicalonkan juga harus “jatuh bangun” dan “habis-habisan” untuk melakukan kampanye. Jika tidak mempunyai modal besar, tampaknya sulit mewujudkan impian.



E. CATATAN PENUTUP

Terlepas dari beberapa tantangan, kendala, kekurangan, kelebihan, pro dan kontra tentang perempuan dalam politik, kenyataan yang harus kita hadapi adalah kita harus mau dan mampu mendekonstruksi *image* sehingga lahir konstruksi *image* baru sosok perempuan dalam politik. Hal ini akan dapat terwujud manakala mendapat dukungan institusi dan dukungan pemilih.

Sistem kuota memang menjadi alternatif paling dekat yang dapat dijalankan, namun kenyataannya *toh* tidak terpenuhi juga. Apakah kita harus menunggu sampai terpenuhinya kuota baru. Kita dapat menyuarakan aspirasi, keinginan, dan kebutuhan perempuan? Bagi saya, yang penting bukan persoalan laki-laki atau perempuan, bukan persoalan jumlah dan jenis kelamin. Mulailah sekarang juga. Untuk apa mengumpulkan banyak perempuan, tetapi mereka tidak sadar akan kebutuhan perempuan, tidak tahu aspirasi perempuan, dan tidak dapat menyuarakan kepentingan perempuan, lebih baik mengumpulkan banyak orang —entah laki-laki entah perempuan—yang penting sensitif gender dan menyuarakan aspirasi perempuan.

ENDNOTE

¹ Bagian ini diambil dari artikel yang pernah saya tulis dan di muat di *Harian Umum Suara Merdeka* pada 2 Februari 1994.

² Saya tidak akan mengutip data perwakilan politik di berbagai lembaga Negara oleh kaum perempuan karena kita semua sudah tahu persis bahwa dari tahun ke tahun perwakilan tetap masih belumimbang meski sudah ada peningkatan.

³ Ani W. Soejipto, "Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik" dalam *Perempuan dan Pemberdayaan* (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana UI, 1997), hal 233 - 244.

⁴ Issbodrorini Suyanto, "Peranan Sosialisasi Politik terhadap Partisipasi Politik Perempuan" dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Ihromi, T.O (Ed) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 482 - 508.

⁵ Ani W. Soejipto, "Berbagai Hambatan".

⁶ Tri Marhaeni P. Astuti, "Kesenjangan Gender dalam bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan" dalam *Buku Ajar Antropologi Gender* (Semarang: FIS UNNES, 2007).

⁷ Linda K. Richter, *Exploring Theories of Female Leadership in South and Southeast*, (Asia: Pacific Affairs, 1990).

⁸ Tri Marhaeni P. Astuti, dalam *Kompas* pada 28 Juni 2005, hal. 32.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Tri Marhaeni P. 1994. "Wanita Pemimpin Politik di Asia", dalam *Harian Suara Merdeka* edisi 2 Februari 1994.



- . 2005. "Tentang Perempuan atau untuk Perempuan", dalam *Kompas* 28 Juni 2005 halaman 32.
- . 2007. "Kesenjangan Gender dalam bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan", dalam *Buku Ajar Antropologi Gender*. Semarang: FIS UNNES.
- Randall, Vicky. 1982. *Women and Politics*. New York: St. Martin's Press.
- Richter, Linda K. 1990. *Exploring Theories of Female Leadership in South and Southeast Asia: Pacific Affairs*.
- Soejipto, Ani W. 1997. "Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik" dalam *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana UI.
- Suyanto, Issbodrorini. 1995. "Peranan Sosialisasi Politik terhadap Partisipasi Politik Perempuan" dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Ihromi, T.O (Ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.